



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2012;
29. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 22.040.801.447.924,03	
b. Dana Perimbangan	Rp 11.554.964.807.804,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 1.783.413.796.261,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp 35.379.180.051.989,03
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp 9.688.176.243.356,00	
2) Belanja Bunga	Rp 3.172.974.470,00	
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00	
4) Belanja Hibah	Rp 1.933.097.203.700,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 15.993.940.302,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 30.186.258.790,00	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 2.487.672.700,00</u>	
		Rp 11.673.114.293.318,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp 1.397.773.926.422,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.703.452.918.759,00	
3) Belanja Modal	<u>Rp 8.784.365.760.426,00</u>	
		<u>Rp 19.885.592.605.607,00</u>
Jumlah Belanja		Rp 31.558.706.898.925,00
Surplus		Rp 3.820.473.153.064,03
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp 6.475.552.012.483,20	
b. Pengeluaran	<u>Rp 832.303.634.733,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto		<u>Rp 5.643.248.377.750,20</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp 9.463.721.530.814,23

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2013

Tanggal 27 Agustus 2013

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6 = 4 : 3
1	PENDAPATAN	33,650,011,958,617.00	35,379,180,051,989.03	1,729,168,093,372.03	105.14
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20,523,433,370,351.00	22,040,801,447,924.03	1,517,368,077,573.03	107.39
1.1.1	Pajak Daerah	16,525,000,000,000.00	17,721,493,016,509.32	1,196,493,016,509.32	107.24
1.1.2	Retribusi Daerah	901,224,604,600.00	1,820,435,447,667.00	919,210,843,067.00	202.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	360,000,000,000.00	351,823,210,568.54	(8,176,789,431.46)	97.73
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	2,737,208,765,751.00	2,147,049,773,179.17	(590,158,992,571.83)	78.44
1.2	DANA PERIMBANGAN	9,776,877,857,000.00	11,554,964,807,804.00	1,778,086,950,804.00	118.19
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9,501,550,000,000.00	11,279,636,950,804.00	1,778,086,950,804.00	118.71
1.2.2	Dana Alokasi Umum	275,327,857,000.00	275,327,857,000.00	0.00	100.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,349,700,731,266.00	1,783,413,796,261.00	(1,566,286,935,005.00)	53.24
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,533,136,668,266.00	3,731,333,261.00	(1,529,405,335,005.00)	0.24
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,816,564,063,000.00	1,779,682,463,000.00	(36,881,600,000.00)	97.97
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA DAERAH	38,366,680,073,841.00	31,558,706,898,925.00	(6,807,973,174,916.00)	82.26
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,552,587,002,387.00	11,673,114,293,318.00	(879,472,709,069.00)	92.99
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	10,286,142,104,248.00	9,688,176,243,356.00	(597,965,860,892.00)	94.19
2.1.2	BELANJA BUNGA	4,353,828,000.00	3,172,974,470.00	(1,180,853,530.00)	72.88
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	BELANJA HIBAH	2,089,282,239,330.00	1,933,097,203,700.00	(156,185,035,630.00)	92.52
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	29,470,000,000.00	15,993,940,302.00	(13,476,059,698.00)	54.27
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	46,350,000,000.00	30,186,258,790.00	(16,163,741,210.00)	65.13
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	96,988,830,809.00	2,487,672,700.00	(94,501,158,109.00)	2.56

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6 = 4 : 3
2.2	BELANJA LANGSUNG	25,814,093,071,454.00	19,885,592,605,607.00	(5,928,500,465,847.00)	77.03
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,610,699,060,912.00	1,397,773,926,422.00	(212,925,134,490.00)	86.78
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,383,664,759,250.00	9,703,452,918,759.00	(1,680,211,840,491.00)	85.24
2.2.3	BELANJA MODAL	12,819,729,251,292.00	8,784,365,760,426.00	(4,035,363,490,866.00)	68.52
	Surplus / (Defisit)	(4,716,668,115,224.00)	3,820,473,153,064.03	8,537,141,268,288.03	0.00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	7,703,218,490,508.00	6,475,552,012,483.20	(1,227,666,478,024.80)	84.06
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7,703,218,490,508.00	6,475,552,012,483.20	(1,227,666,478,024.80)	84.06
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6,470,618,490,508.00	6,470,618,490,508.20	0.20	100.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	4,933,521,975.00	4,933,521,975.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1,232,600,000,000.00	0.00	(1,232,600,000,000.00)	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,986,550,375,284.00	832,303,634,733.00	(2,154,246,740,551.00)	27.87
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	49,061,900,213.00	49,061,900,213.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,781,684,906,912.00	618,477,833,261.00	(2,163,207,073,651.00)	22.23
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	151,465,468,372.00	109,323,901,259.00	(42,141,567,113.00)	72.18
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	53,400,000,000.00	55,440,000,000.00	2,040,000,000.00	103.82
	Pembiayaan Neto	4,716,668,115,224.00	5,643,248,377,750.20	926,580,262,526.20	119.64
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0.00	9,463,721,530,814.23	9,463,721,530,814.23	0.00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2013
Tanggal 27 Agustus 2013

**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH											
ORGANISASI : 1.20.001 DPRD Propinsi 0.01.00.00.0000.000											
KODE REKENING		URAIAN		Angg. Setelah Perubahan		Realisasi		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
1		2		3		4		5 = 4 - 3		6	
JUMLAH PENDAPATAN				0.00		0.00		0.00			
1.20	001	00	00	5							
BELANJA DAERAH											
1.20	001	00	00	5	1						
				36,668,244,320.00		35,662,162,944.00		(1,006,081,376.00)			
BELANJA TIDAK LANGSUNG											
1.20	001	00	00	5	1	1					
				36,668,244,320.00		35,662,162,944.00		(1,006,081,376.00)			
BELANJA PEGAWAI											
1.20	001	00	00	5	1	1	01				
				26,516,244,320.00		25,510,162,944.00		(1,006,081,376.00)			
Gaji dan Tunjangan											
1.20	001	00	00	5	1	1	01	01			
				26,516,244,320.00		25,510,162,944.00		(1,006,081,376.00)			
Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD											
1.20	001	00	00	5	1	1	03				
				10,152,000,000.00		10,152,000,000.00		0.00			
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH											
1.20	001	00	00	5	1	1	03	01			
				10,152,000,000.00		10,152,000,000.00		0.00			
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD											
JUMLAH BELANJA				36,668,244,320.00		35,662,162,944.00		(1,006,081,376.00)			
SURPLUS / (DEFISIT)				(36,668,244,320.00)		(35,662,162,944.00)		1,006,081,376.00			
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				0.00		0.00		0.00			
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				0.00		0.00		0.00			
PEMBIAYAAN NETTO				0.00		0.00		0.00			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH													
ORGANISASI : 1.20.380 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 7.00.00.00.0000.000													
KODE REKENING													
URAIAN													
Angg. Setelah Perubahan													
Realisasi													
Bertambah / (Berkurang)													
PENJELASAN													
1													
2													
3													
4													
5 = 4 - 3													
6													
1.20	380	00	00	6	2	2	02		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2,781,684,906,912.00	618,477,833,261.00	(2,163,207,073,651.00)	
1.20	380	00	00	6	2	2	02	01	BUMD	2,781,684,906,912.00	618,477,833,261.00	(2,163,207,073,651.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3			Pembayaran Pokok Utang	151,465,468,372.00	109,323,901,259.00	(42,141,567,113.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	01		Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	11,228,300,000.00	8,169,288,822.00	(3,059,011,178.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	01	01	Penerusan Pinjaman	11,228,300,000.00	8,169,288,822.00	(3,059,011,178.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	11		Pembayaran Utang kepada Pihak ke III	35,045,236,858.00	34,653,506,454.00	(391,730,404.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	11	01	Pembayaran Utang Kepada Pihak ke III	35,045,236,858.00	34,653,506,454.00	(391,730,404.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	12		Pembayaran Utang Kepada Pegawai	410,340,499.00	112,920,178.00	(297,420,321.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	12	01	Pembayaran Utang Kepada Pegawai	410,340,499.00	112,920,178.00	(297,420,321.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	13		Pembayaran Utang Biaya Pemungutan	4,183,175,979.00	4,077,107,793.00	(106,068,186.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	13	02	Pembayaran Utang Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2,667,109,851.00	2,667,109,851.00	0.00	
1.20	380	00	00	6	2	3	13	01	Pembayaran Utang Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,516,066,128.00	1,409,997,942.00	(106,068,186.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	14		Pembayaran Utang Suku Cadang	2,365,000.00	0.00	(2,365,000.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	14	01	Pembayaran Utang Suku Cadang Kendaraan Bermotor	2,365,000.00	0.00	(2,365,000.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	15		Pembayaran Utang Perpanjangan STNK	4,642,500.00	3,629,500.00	(1,013,000.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	15	01	Pembayaran Utang Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional	4,642,500.00	3,629,500.00	(1,013,000.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	16		Pembayaran Utang Pajak	100,591,407,536.00	62,307,448,512.00	(38,283,959,024.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	16	02	Pembayaran Utang Pajak PPN	70,361,623,399.00	41,881,918,690.00	(28,479,704,709.00)	
1.20	380	00	00	6	2	3	16	01	Pembayaran Utang Pajak PPh	30,229,784,137.00	20,425,529,822.00	(9,804,254,315.00)	
1.20	380	00	00	6	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah	53,400,000,000.00	51,360,000,000.00	(2,040,000,000.00)	
1.20	380	00	00	6	2	4	03		Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir	53,400,000,000.00	51,360,000,000.00	(2,040,000,000.00)	
1.20	380	00	00	6	2	4	03	01	Dana Bergulir PPMK Kepada Perorangan dan Kelompok Masyarakat	53,400,000,000.00	51,360,000,000.00	(2,040,000,000.00)	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN										2,986,550,375,284.00	730,099,834,307.00	(2,256,450,540,977.00)	
PEMBIAYAAN NETTO										4,716,668,115,224.00	5,745,452,178,176.20	1,028,784,062,952.20	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO